

## **Peluang Indonesia sebagai Ketua ASEAN Tahun 2023 dalam Mempromosikan Penggunaan *Local Currency Settlement* dan *QR Code* Lintas Batas terkait Transaksi Perdagangan di Asia Tenggara**

Jason Fernando<sup>1</sup>, Ezra Yora Turnip<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia,  
jasonfernando210502@gmail.com

<sup>2</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia,  
ezrayora26@gmail.com

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa Indonesia berperan penting dalam mempromosikan penggunaan *Local Currency Settlement* dan *QR Code* Lintas Batas selama memegang posisi keketuaan ASEAN tahun 2023. *Local Currency Settlement* berfungsi untuk melakukan penyelesaian transaksi bilateral antara negara dalam satu kawasan Asia Tenggara dengan menggunakan mata uang masing-masing negara tersebut. Kehadiran LCS dilatarbelakangi oleh inflasi global yang begitu tinggi akibat tensi geopolitik dan naiknya suku bunga dolar AS, sehingga situasi tersebut menjadi kesempatan bagi negara-negara anggota ASEAN untuk menggunakan mata uang lokal. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis efisiensi LCS sebagai metode transaksi perdagangan kawasan Asia Tenggara dalam memperkuat integrasi ekonomi dan mengurangi ketergantungan terhadap Dolar AS. Bahkan LCS ini sebagai instrumen utama yang berdampak untuk memperkuat stabilitas mata uang di negara-negara Asia Tenggara itu sendiri, semakin mempermudah kegiatan ekspor-impor satu sama lain, dan terciptanya kemudahan pada proses masuknya arus modal asing di kawasan tersebut. Disamping itu, Indonesia juga memegang tanggung jawab lebih dalam menangani kendala promosi maupun penggunaan *QR Code* Lintas Batas sebagai teknologi yang akan mempermudah transaksi mata uang lokal bagi ASEAN, yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik melalui sistem dan strategi yang telah dirancang. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif analisis, serta teori integrasi ekonomi kawasan menurut Van Niekerk terkait peranan Indonesia dalam mempromosikan efisiensi LCS dan *QR Code* Lintas Batas di ASEAN. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia mengajak setiap anggota ASEAN untuk penggunaan LCS ini, karena akan menciptakan kondisi yang sesuai dengan tema KTT ASEAN tahun 2023, dimana Asia Tenggara berpotensi menjadi area episentrum pertumbuhan ekonomi kawasan sejak saat ini hingga masa mendatang.

**Kata Kunci:** ASEAN; ekonomi digital; Indonesia; *Local Currency Settlement*; *QR Code* lintas batas

### **ABSTRACT**

*This research aims to explain that Indonesia plays an important role in promoting the use of Local Currency Settlement and Cross-Border QR Code while holding the ASEAN chairmanship position in 2023. Local Currency Settlement functions to settle bilateral transactions between countries in one Southeast Asian region using the currencies of each of these countries. The presence of the LCS was motivated by high global inflation due to geopolitical tensions and rising US Dollar interest rates, so that this situation became an opportunity for ASEAN member countries to use local currencies. The purpose of this research is to analyze the efficiency of the LCS as a method of trade transactions in the Southeast Asia region in strengthening economic integration and reducing dependence on the US Dollar. Even the LCS is the main instrument that has the impact of strengthening currency stability in the Southeast Asian countries themselves, making export-import activities easier for each other, and creating ease in the process of foreign capital inflows into the region. In addition, Indonesia also bears more responsibility in dealing with obstacles to the promotion and use of the Cross-border QR Code as a technology that will facilitate local currency transactions for ASEAN, which is expected to be carried out properly through the systems and strategies that have been designed. In this research using*

*qualitative analysis methods, as well as the theory of integration of economic areas according to Van Niekerk related to Indonesia's role in promoting the efficiency of LCS and Cross-border QR Code in ASEAN. This research concludes that Indonesia invites every ASEAN member to use this LCS, because it will create conditions in accordance with the theme of the 2023 ASEAN Summit, where Southeast Asia has the potential to become the epicentrum of regional economic growth from now on into the future.*

**Keywords:** ASEAN; digital economy; Indonesia; Local Currency Settlement; cross-border QR Code

## **Pendahuluan**

ASEAN merupakan *inter-governmental organization* berbasis kawasan yang menjadi poros koordinasi dan kepemimpinan bagi negara-negara anggotanya. Untuk mewujudkan hal itu, ASEAN menyusun berbagai strategi, sistem dan hal lain yang dapat mendukung peningkatan berbagai sektor di kawasan, seperti ekonomi, sosial, pertahanan keamanan, dan lain-lain. ASEAN telah membuat kemajuan yang signifikan dalam ekonomi digital kawasan, hal ini dapat dilihat dari data peningkatan pertumbuhan ekonomi dekade ini sebesar 4-5%, serta beberapa sumber ekonomi yang mulai bangkit pasca terdampak Covid-19. Namun, tantangan dan masalah mendasar tetap ada termasuk kesenjangan infrastruktur digital, struktur kelembagaan keuangan digital, privasi dan keamanan dan tidak ada ketentuan pendukung. Pada tahun 2023, Indonesia dipercaya untuk memegang kepresidenan ASEAN (termasuk KTT ASEAN ke-42 tanggal 9-11 Mei 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Indonesia), sehingga Indonesia kembali ingin menjadikan *ASEAN people-centered* sebagai entitas sentral dalam upaya membumikan konsep dan manfaat ASEAN yang manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Tugas tersebut tidak mudah mengingat tantangan dan dinamika yang berbeda dalam beberapa tahun terakhir dan di tingkat regional dan internasional, termasuk dampak krisis pandemi Covid-19 yang turut berdampak pada bidang bisnis dan perawatan kesehatan.

Kepemimpinan ASEAN adalah bayangan cermin pada penerimaan umum politik di negara-negara anggota ASEAN sebagai implementasi dari berbagai kebijakan ASEAN. Indonesia dalam ASEAN 2023 menjunjung tema "*Epicentrum of Growth*" yang memiliki harapan agar dapat menjadikan ASEAN sebagai poros kemajuan ekonomi baik bagi masyarakat anggota negara ASEAN maupun bagi dunia. Guna mewujudkan hal tersebut, Indonesia telah merancang tiga pilar prioritas untuk hasil yang akan dicapai, diantaranya (1) *Recover-rebuilding*, dimana ASEAN akan berusaha untuk mengeksplorasi campuran dari kebijakan yang telah dirancang dan dinegosiasikan guna memastikan terjadinya pemulihan dan percepatan ekonomi sembari mengidentifikasi resiko dari terjadinya inflasi di kawasan. (2) *Digital-economy*, sejalan dengan *Local Currency Settlement* yang penulis teliti, ASEAN terus berupaya untuk memperkuat inklusi keuangan dan literasi digitalnya, hal ini dilakukan dengan terus meningkatkan kapasitas dari masing-masing negara anggota untuk merancang strategi finansial yang sejalan dengan kondisi dan peluang dimasing-masing negara anggota. (3) *Sustainability*, sejalan dengan masalah global yang dihadapi dunia, yaitu iklim, maka ASEAN turut merancang tujuan dan strategi yang sama untuk menciptakan ekonomi hijau bagi semua negara anggota.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Bank Indonesia. 2023. ASEAN Indonesia 2023. Diakses dari <https://www.bi.go.id/id/asean-2023/default.aspx>

Dalam hal ekonomi, ASEAN bertekad untuk semakin meningkatkan kemajuan ekonomi kawasan yang didukung oleh kerjasama ekonomi antar negara. Kerjasama ekonomi yang terjadi membutuhkan alat dukung untuk mempermudah pendistribusian penjualan, seperti alat tukar yang dapat dijangkau di setiap negara. *Local Currency Settlement (LCS) Framework* dipilih ASEAN sebagai metode penyelesaian transaksi maupun pembayaran dengan mata uang lokal di masing-masing negara.<sup>2</sup> Metode pembayaran ini sedang diinisiasikan oleh negara-negara ASEAN dalam melakukan transaksi keluar maupun kedalam negara anggota. Awalnya, *LCS Framework* diinisiasikan oleh 3 negara ASEAN, yakni Indonesia, Malaysia dan Thailand pada tahun 2018. Kerja sama ini cukup berorientasi pada tujuan utama untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS yang semakin kuat dan menciptakan situasi ketidakamanan, serta kemungkinan ancaman terhadap keamanan finansial ketiga negara tersebut.

Inisiasi *Local Currency Settlement (LCS)* juga dipilih yang fungsinya diharapkan dapat mempermudah transaksi antar negara. Perjanjian ini ditandatangani tiga negara melalui bank sentral mereka, Bank Negara Malaysia (BNM), *Bank of Thailand (BOT)* dan Bank Indonesia (BI) pada 11 Desember 2017. Ketiga negara ini berkolaborasi untuk menanggulangi ketakutan mereka mengenai resiko dari hegemoni dolar apabila penggunaan dan ketergantungan terhadap dolar terus berlangsung.<sup>3</sup> Indonesia bersama Bank Indonesia telah berkomitmen untuk memulai kerjasama ini dengan Malaysia dan Thailand, karena menurut data Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik, kedua negara diatas termasuk kedalam mitra dagang utama Indonesia di urutan ke-10 dari total ekspor per tahun.<sup>4</sup>

Dalam pelaksanaan penggunaan LCS, masih terdapat beberapa hambatan dikalangan masyarakat dari berbagai negara, seperti masih banyaknya aktor usaha yang belum mengetahui sistem LCS, enggan menerapkan, dan sebagainya. Sehingga dibutuhkan aksi terbaik dari masing-masing negara untuk turut mensukseskan peluncuran LCS, yang dimana hal itu termasuk fokus dari Indonesia selaku pemrakarsa inisiasi ini. Penyediaan mekanisme pembayaran menggunakan LCS dinilai lebih efisien bagi Indonesia dibandingkan transaksi pertukaran sebelumnya dalam dolar AS hanya dari rupiah ke mata uang lokal negara mitra atau sebaliknya. *Local currency settlement* turut menciptakan nilai tukar yang lebih stabil antar negara yang menerapkannya, begitu juga dengan nilai tukar rupiah yang cenderung stabil akibat melemahnya permintaan dolar AS. Kemudian Indonesia berpeluang untuk memperoleh mata uang lain dari negara mitra LCS, yang akan menambah cadangan devisa Indonesia. Pertumbuhan perdagangan Indonesia ini disebabkan pemanfaatan maksimum agregat perdagangan negara-negara mitra dagang terpenting yang mengadopsi LCS.<sup>5</sup>

Dalam implementasi penggunaan LCS, dibutuhkan instrumen atau teknologi digital untuk memfasilitasi transaksi, hal yang dipilih oleh ASEAN adalah *Quick Response (QR) Code* atau metode pembayaran digital dengan cara *scan* setiap kode pembayaran yang tertera di setiap mitra ekonomi. QR

<sup>2</sup>Indonesia.go.id. 2023. Mendorong ASEAN Gunakan Mata Uang Lokal. 18 Maret. Diakses dari <https://indonesia.go.id/kategori/ragam-asean-2023/6938/mendorong-asean-gunakan-mata-uang-lokal?lang=1>

<sup>3</sup>Phoebe, Marsha. 2022. *The Future of ASEAN Financial Integration Through the Local Currency Settlement Framework*. 18 Juni. Diakses dari <https://moderndiplomacy.eu/2022/06/18/the-future-of-asean-financial-integration-through-the-local-currency-settlement-framework/>

<sup>4</sup>Badan Pusat Statistik. 2017. Nilai Ekspor Impor Indonesia. Diakses dari <https://www.bps.go.id/subject/8/ekspor-impor.html>

<sup>5</sup>Widy, Putri Eka. "Kerjasama *Local Currency Settlement* Dalam Meningkatkan Perdagangan Internasional Indonesia Tahun 2018-2022." PhD diss., Universitas Jenderal Soedirman, 2022.

code ini pada pelaksanaannya akan diterapkan oleh ASEAN dengan menggunakan perjanjian *B to B* atau lebih tepatnya perjanjian antar bank, sehingga hanya bank sentral yang sudah mendukung penggunaan QR saja yang bisa melakukan LCS. Hingga saat ini, telah terdapat 5 negara ASEAN yang sudah menggunakan *QR Code* dalam melakukan transaksi pembelian, yakni Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura. Penggunaan *QR Code* di 5 negara ASEAN dinilai efisien untuk memudahkan dan mempercepat transaksi, mendukung percepatan investasi, menjaga stabilitas ekonomi makro dan mikro, serta membawa dampak keuntungan pula bagi sektor pariwisata dan UMKM. Dengan menggunakan *QR Code* yang notabene nya adalah transaksi berbasis digital, masyarakat dapat melakukan transaksi dengan cepat, mudah, dimana dan kapan saja, sehingga dalam arti sederhana bahwa transaksi dapat dilakukan di negara lain tanpa harus bergantung pada satu mata uang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis bahwa Indonesia akan terus berupaya untuk mendistribusikan penerapan *Local Currency Settlement* dan *QR Code* lintas batas di kawasan Asia Tenggara, dimana optimisme yang ditunjukkan oleh Indonesia ini didukung oleh kepemimpinan yang sedang Indonesia jalani yakni sebagai presiden ASEAN pada tahun 2023, dari hal ini Indonesia berharap dapat semakin memiliki banyak peluang untuk mempromosikan penerapan LCS hingga *QR Code* lintas batas dikalangan masyarakat kawasan Asia Tenggara.

## Studi Literatur

Studi literatur akan dipetakan dalam bentuk tiga bagian penting yang saling berkorelasi terkait penelitian ini. Studi literatur yang pertama tentang integrasi keuangan di Asia Tenggara yang ditulis oleh Aladdin D. Rillo. Studi literatur kedua terkait dengan kerja sama perdagangan melalui penggunaan *Local Currency Settlement* oleh Indonesia, baik dalam ASEAN maupun dengan Tiongkok yang ditulis oleh Aprilia Dwi Rasdiyanti, Suyeno, Aldy Nofansya, Hasan Sidik, dan Hadi Nur Muta'ali. Selanjutnya, studi literatur ketiga yang dijadikan sebagai karya pembandingan dalam penelitian ini terkait penggunaan *QR Code* lintas batas di ASEAN yang dituliskan oleh Atsal Amar Bani Rachmad dan Maritza Ramadhani Raharjo.

Artikel yang menjadi literatur pertama terkait Perekonomian ASEAN telah terintegrasi secara finansial selama dekade terakhir yang ditulis oleh Aladdin D. Rillo, berjudul *ASEAN Financial Integration: Opportunities, Risks, and Challenges*. Aladdin menjelaskan bahwa pentingnya bagi para pembuat kebijakan di ASEAN untuk terus mengambil langkah-langkah konkrit untuk memperdalam integrasi keuangan di kawasan. ASEAN berupaya untuk membangun komunitas ekonomi yang lebih berkelanjutan pada tahun 2025, melalui beberapa langkah yang memfasilitasi arus bebas barang dan jasa, serta investasi sesuai dengan langkah-langkah pasar seperti memperdalam likuiditas, agar dapat membantu memastikan pasar keuangan dimaksimalkan untuk kepentingan integrasi kawasan. Oleh karena itu, kebijakan yang mendorong pengembangan pasar keuangan perlu menjadi prioritas oleh ASEAN. Aladdin menunjukkan bahwa salah satu pilihan kebijakan utama tersebut yakni meningkatkan sistem pembayaran yang mudah dan terjamin. Sistem pembayaran yang mudah menjadi instrumen kebijakan yang dirancang untuk mencapai tujuan pembangunan kawasan, serta melindungi risiko arus perdagangan dan investasi. Oleh karena itu sistem pembayaran yang mudah seperti hadirnya *Local Currency Settlement* akan menciptakan iklim integrasi keuangan di ASEAN secara

signifikan akan mempermudah interkoneksi perdagangan antar negara anggota Kawasan. Tanpa hadirnya sistem pembayaran yang mudah seperti LCS, integrasi perdagangan dan finansial di ASEAN tidak mungkin terjadi.<sup>6</sup>

Literatur kedua merupakan artikel yang ditulis oleh Aprilia Dwi Rasdiyanti dan Suyeno, berjudul **Analisis SWOT Kebijakan *Local Currency Settlement* Indonesia-Tiongkok**. Kedua penulis menunjukkan bahwa Indonesia mulai beralih menggunakan sistem pembayaran dalam bentuk *Local Currency Settlement* (mata uang lokal) sebagai cara untuk mengurangi ketergantungan dolar AS. Penggunaan LCS ini diterapkan oleh Indonesia dalam menjalin hubungan perdagangan dan investasi dengan Tiongkok, dimana rupiah dan yuan menjadi alat pembiayaan antar keduanya. Disini kedua penulis menjelaskan LCS menjadi instrumen yang mampu meminimalisir nilai investasi apabila mengalami penurunan, serta berpotensi meningkatkan pasar ekspor Indonesia ke Tiongkok. Penggunaan LCS ini akan memberikan kemudahan kepada para pebisnis hingga UMKM. Oleh karena itu, LCS akan menjadi metode transaksi baru yang berdampak pada peningkatan arus perdagangan secara bilateral, serta kelancaran aliran modal yang masuk; dimana nantinya akan mempengaruhi stabilisasi bagi perekonomian Indonesia.<sup>7</sup>

Literatur ketiga terkait pelaksanaan *local currency settlement* yang ternyata telah diterapkan sebelumnya oleh tiga negara ASEAN; seperti Indonesia, Malaysia dan Thailand. Artikel ini ditulis oleh Aldy Nofansya dan Hasan Sidik, dengan judul **Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Malaysia-Thailand: Penguatan *Local Currency Settlement (LCS)* Framework dalam Memfasilitasi Perdagangan**. Kedua penulis menjelaskan bahwa penggunaan LCS telah menghasilkan tren yang positif, dimana terjadinya kenaikan nilai transaksi antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand sejak tahun 2018. LCS ringgit mengalami peningkatan menjadi 49.6 juta USD per bulan di 2019 dan 50 juta lebih USD di 2020. Kemudian, transaksi LCS bath memperlihatkan adanya peningkatan menjadi 13.7 juta USD per bulan di 2019. Penerapan LCS ini tentu akan mempengaruhi pada peningkatan *economic growth* antar ketiga negara tersebut, yang nantinya diperkirakan menciptakan jalur konektivitas perdagangan secara progresif bagi ASEAN. Indonesia, Malaysia, dan Thailand melihat bahwa ketergantungan dolar AS berpotensi menimbulkan risiko finansial jika dolar itu sendiri sedang mengalami stagnasi yang berakibat pada inflasi. Oleh karena itu, ketiga negara beralih menggunakan sistem pembiayaan berbasis mata uang lokal. Terdapat dua proses untuk memperkuat penggunaan LCS yang mendorong *trade framework* menurut kedua penulis, yaitu penguatan peran pemangku kepentingan (seperti Bank Indonesia) dalam penggunaan LCS, serta mendorong para pebisnis dan UMKM untuk menggunakan mata uang lokal sebagai alternatif pembayaran pada *trade transactions* terhadap produk unggulan mereka.<sup>8</sup>

Literatur keempat merupakan artikel yang ditulis oleh Hadi Nur Muta'ali yang berjudul **Kepentingan Indonesia Malaysia Thailand Terhadap Kerjasama *Local Currency Settlement Framework (LCS)***. Hadi menjelaskan bahwa penggunaan LCS ini telah diterapkan Indonesia,

---

<sup>6</sup>Rillo, Alladin D. "ASEAN Financial Integration: Opportunities, Risks, and Challenges." *Public Policy Review* Vol. 14, No. 5 (2018): 901-923.

<sup>7</sup>Rasdiyanti, Aprilia Dwi. "Analisis SWOT Kebijakan Local Currency Settlement Indonesia-China." *Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi* (2022): 13-24.

<sup>8</sup>Nofansya, Aldy, and Hasan Sidik. "Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Malaysia-Thailand: Penguatan Local Currency Settlement (LCS) Framework Dalam Memfasilitasi Perdagangan." *Padjadjaran Journal of International Relations*, Vol. 4, No. 2 (2022): 164-178.

Malaysia, dan Thailand untuk melakukan pembiayaan ekspor-impor yang saling terhubung satu sama lain. *Cooperation framework LCS* antar ketiga negara tersebut memberikan manfaat yang diarahkan kepada para investor agar diberikan kemudahan ketika berinvestasi secara langsung di tiga negara tersebut yang berlandaskan *hedging costs* secara rendah. Skema transaksi menggunakan mata uang lokal ini sangat menguntungkan para investor, sehingga mereka tidak perlu lagi menggunakan dolar AS. Hadi juga menunjukkan bahwa terjadinya kenaikan net kewajiban pada investasi internasional di Indonesia sebesar US\$ 330,3 Miliar semenjak diberlakukannya transaksi LCS Pada tahun 2019.<sup>9</sup>

Literatur selanjutnya terkait penggunaan QRIS lintas batas di ASEAN yang menggunakan mata uang lokal, dimana merupakan artikel yang ditulis oleh Atsal Amar Bani Rachmad dan Maritza Ramadhani Raharjo berjudul '*QRIS Cross Border*' as *Digital Financial Inclusion Acceleration in Southeast Asia*. Kedua penulis menunjukkan bahwa pembayaran yang dilakukan secara digital dalam transaksi perdagangan dan investasi dapat berkontribusi dalam pengelolaan aliran pendapatan dan pengeluaran, serta berperan sebagai pintu gerbang produk kredit yang dapat digunakan untuk mendanai aktivitas bisnis yang sedang dijalani. Selain itu, keuangan digital secara langsung ini disebut sebagai *QRIS Cross Border*; dimana ini dapat meningkatkan kepercayaan antara pebisnis dan konsumen di Kawasan ASEAN. QRIS lintas batas ini perlu menggunakan *Local Currency Settlement* sebagai instrumennya, sehingga dari sini negara-negara Asia Tenggara harus sependapat jika ingin melanjutkan upaya mengembangkan infrastruktur pembayaran terintegrasi lintas batas tersebut. QRIS lintas batas ini akan menciptakan integrasi ekonomi dan keuangan kawasan yang mengarah pada stabilitas. QRIS lintas batas dinilai efektif menurut kedua penulis, karena dapat menjadi salah satu pilar diplomasi multijalur Indonesia untuk keketuaan ASEAN tahun 2023. Indonesia disini dapat mempromosikan dapat berperan sebagai model bagi negara-negara Asia Tenggara lainnya untuk menerapkan penggunaan QRIS lintas batas disertai mata uang lokal (LCS). Dengan begitu, infrastruktur pembayaran terintegrasi (QRIS lintas batas dan LCS) ini dapat mendorong inklusi keuangan digital yang akan memudahkan proses perdagangan antar negara anggota ASEAN, dengan tanpa ketergantungan mata uang luar kawasan.<sup>10</sup> Fenomena penggunaan *Local Currency Settlement* melalui *QR Code* lintas batas menjadi metode transaksi secara berkelanjutan, yang perlu diterapkan oleh Kawasan ASEAN di tengah era digital. Indonesia yang memegang posisi keketuaan ASEAN pada tahun 2023 berupaya mempromosikan kerangka kerjasama penerapan LCS untuk memperkuat integrasi ekonomi kawasan, serta mengurangi ketergantungan dolar AS. Mengacu hal tersebut, penelitian ini akan menjawab pertanyaan mengapa penggunaan LCS dan *QR Code* lintas batas dalam perdagangan regional perlu dipromosikan oleh Indonesia selama menjadi ketua ASEAN tahun 2023?

## Metode dan Kerangka Teori

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif analisis. Penelitian kualitatif berasal dari proses berpikir induktif dan didasarkan pada analisis objektif yang diamati dari fenomena sosial. Dalam penelitian kualitatif, proses dialog dan interaksi mendalam antara peneliti

---

<sup>9</sup>Muta'ali, Hadi Nur. "Kepentingan Indonesia Malaysia Thailand Terhadap Kerjasama Local Currency Settlement Framework (LCS)." *E-jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, Vol. 8, No. 1 (2020).

<sup>10</sup>Raharjo, Maritza. "'QRIS Cross Border' as Digital Financial Inclusion Acceleration in Southeast Asia." *Global Local Interactions: Journal of International Relations*, Vol. 3, No. 1 (2023): 151-161.

dengan topik yang diteliti diprioritaskan dalam upaya menangkap fenomena secara organik dalam konteks sosial. Penelitian kualitatif ditujukan untuk menganalisis dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data yang didapat dan merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui agar tidak terjadi kesalahan dalam memilih sumber data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang diperoleh dari hasil penelaahan studi literatur atau penelaahan terhadap berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, berita, dan dokumen penting lain-lainnya yang berkaitan dengan efisiensi dan promosi *Local Currency Settlement* dan *QR Code* lintas batas bagi pertumbuhan ekonomi Asia tenggara di era digitalisasi pada saat masa kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN 2023.

Integrasi ekonomi kawasan telah menjadi fenomena kontemporer dalam hubungan internasional, dimana negara-negara dalam kawasan yang sama membentuk integrasi ekonomi berbentuk longgar (kerja sama perdagangan) hingga blok ekonomi. Ada banyak contoh integrasi ekonomi di kawasan, salah satunya yaitu ASEAN (melalui *ASEAN Economic Community* dan *ASEAN Free Trade Area*). Integrasi ekonomi kawasan dapat didefinisikan sebagai kesepakatan antara negara-negara anggota dalam satu kawasan untuk mengurangi dan pada akhirnya menghilangkan hambatan terhadap arus bebas barang, jasa, dan faktor produksi antara satu sama lain, serta nantinya akan memudahkan skema pembayaran atau transaksi dalam perdagangan.<sup>11</sup> Adanya integrasi ekonomi akan meningkatkan perdagangan antar-negara dalam kawasan tersebut, sehingga PDB kawasan ikut meningkat, yang pada gilirannya kesejahteraan rakyat juga akan ikut meningkat.

Van Niekerk menunjukkan bahwa tujuan negara-negara dalam satu kawasan melaksanakan integrasi ekonomi, agar memajukan efisiensi ekonomi melalui alokasi sumber daya ekonomi yang lebih baik, meningkatkan skala ekonomi untuk meraih *mutual benefits*, serta sebagai strategi untuk menghadapi persaingan dalam perdagangan internasional di tengah daya saing yang tinggi pada era globalisasi. Selain itu, integrasi ekonomi ini nantinya akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan maupun *output riel*, serta pertumbuhan ekonomi di negara-negara yang tergabung dalam integrasi tersebut melalui prinsip spesialisasi dan kompetisi. Tentu kehadiran integrasi ekonomi akan memudahkan negara-negara anggota dalam satu kawasan untuk mengadopsi suatu kebijakan (seperti adanya *Local Currency Settlement* dan *QR Code* lintas batas di ASEAN) sebagai bentuk memperkuat kerja sama, demi stabilitas ekonomi regional. Integrasi ekonomi ini juga bermanfaat, karena negara-negara anggota akan bersatu untuk memajukan perekonomian kawasan secara inklusif dan kompeten, serta tidak terlalu bergantung terhadap metode ekonomi dan perdagangan (termasuk mata uang) yang diterapkan oleh kawasan lain; agar terdapatnya ciri khas tersendiri bagi keberlangsungan kawasan itu sendiri.

Kemudian, Van Niekerk menunjukkan tiga prinsip agar integrasi ekonomi kawasan dapat berhasil. Untuk yang pertama, terdapat prinsip *open-regionalism*, yang berusaha untuk memastikan bahwa strategi sub-kawasan dan kebijakan reformasi nasional dengan didasarkan pada kesamaan atau kedekatan paradigma ideologi dan nilai (*value and ideology similarity*) dalam melihat setiap permasalahan ekonomi kawasan, secara kompatibel dan saling menguatkan. Contohnya seperti

---

<sup>11</sup>Bakry, Umar Suryadi. 2015. *Ekonomi Politik Internasional: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. (hal 165-166)

integrasi ekonomi ASEAN yang ditunjang oleh kedekatan latar belakang budaya (*value*), sehingga terciptanya prinsip kerja sama yang kuat dan kompak untuk menerapkan suatu kebijakan ekonomi dan finansial, serta saling pengertian apabila terjadi perbedaan kepentingan terhadap kebijakan tersebut. Kedua, prinsip *subsidiarity* yang memberikan pedoman untuk membagi tanggung jawab antara negara anggota dalam satu kawasan untuk memfasilitasi proses integrasi ekonomi. Ketiga, prinsip *pragmatism* yang menunjukkan bahwa integrasi ekonomi tetap dapat dilaksanakan secara realistis, meskipun kondisi setiap negara anggota memiliki perbedaan. Dengan begitu, teori integrasi ekonomi kawasan menurut Van Niekerk tersebut dapat dikorelasikan dengan penelitian ini, dimana Indonesia yang memegang posisi keketuaan ASEAN tahun 2023 dapat mendorong negara-negara Asia Tenggara secara mudah untuk menerapkan kebijakan *QR Code* lintas batas dengan menggunakan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan satu sama lain; sehingga terciptanya ekonomi kawasan yang terintegrasi satu sama lain.<sup>12</sup>

## Analisis

### a. “*Epicentrum of Growth*” menjadi Alasan Utama Indonesia dalam Mempromosikan Penggunaan *Local Currency Settlement* dan *QR Code* Lintas Batas di Kawasan Asia Tenggara selama Memegang Keketuaan ASEAN Tahun 2023

ASEAN telah memberikan ruang kolaborasi dan kepemimpinan bagi negara yang tergabung didalamnya untuk memegang kekuatan penuh selama periode yang ditentukan, hal ini juga turut dirasakan oleh Indonesia sebagai pemegang kepresidenan ASEAN tahun 2023 yang mengusung tema “*ASEAN Matters: Epicentrum of Growth*”. Tema tersebut diangkat dengan tekad untuk mengarahkan kerjasama ASEAN pada tahun 2023 agar dapat memperkuat strateginya guna menyelesaikan berbagai tantangan dalam skala global, serta menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran kawasan.

Salah satu fokus utama Indonesia selama menjadi ketua ASEAN tahun 2023, yaitu mendorong Asia Tenggara menjadi kawasan ekonomi yang tumbuh cepat, inklusif, dan berkelanjutan. *Economic growth* merupakan tujuan Indonesia sebagai *chair ASEAN* ini untuk memperteguh *capacity and capability regional* dalam menghadapi arus perkembangan digital selama 20 tahun kedepan. Era disrupsi digital ini mendorong tekad yang kompetitif, adaptif, hingga kooperatif bagi Indonesia untuk mengajak seluruh negara anggota ASEAN lainnya dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, tema keketuaan ASEAN tahun 2023 yakni “*Epicentrum of Growth*”, dimana makna dari motto tersebut menunjukkan bahwa Indonesia ingin berperan aktif menjadikan Asia Tenggara sebagai pusat *economic growth* kawasan maupun global.<sup>13</sup> Hal tersebut dikarenakan Kawasan ASEAN mengalami pertumbuhan PDB yang lebih cepat secara luas daripada rata-rata, serta kebijakan perdagangan yang semakin liberal. Kedua alasan inilah menyebabkan banyak perusahaan multinasional semakin tertarik untuk berinvestasi beberapa tahun terakhir, dimana ASEAN pada

---

<sup>12</sup>Van Niekerk, Lolette Kritzinger. *Regional Integration: Concepts, Advantages, Disadvantages and Lessons of Experience. Southern African Regional Poverty Network.* (2005)  
[https://sarpn.org/documents/d0001249/P1416-RI-concepts\\_May2005.pdf](https://sarpn.org/documents/d0001249/P1416-RI-concepts_May2005.pdf)

<sup>13</sup>Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 2023. Perkuat Posisi ASEAN, Pemerintah Optimis KTT ke-42 Sukses Respons Tantangan Terkini. 2 Mei Diakses dari  
[https://www.kominfo.go.id/content/detail/48803/siaran-pers-no69hmkominfo052023-tentang-perkuat-posisi-asean-pemerintah-optimis-ktt-ke-42-sukses-respons-tantangan-terkini/0/siaran\\_pers](https://www.kominfo.go.id/content/detail/48803/siaran-pers-no69hmkominfo052023-tentang-perkuat-posisi-asean-pemerintah-optimis-ktt-ke-42-sukses-respons-tantangan-terkini/0/siaran_pers)

umumnya memberikan alternatif yang menarik bagi perusahaan multinasional; termasuk keringanan intensif dan keinginan untuk mencari lokasi produksi yang lebih murah.

Adanya tren investasi bersifat komersial dan hampir seluruh negara anggota cenderung tetap konsisten sepanjang tahun dalam segi ekonomi, menjadikan Kawasan ASEAN sebagai salah satu kawasan dengan pertumbuhan tercepat di dunia sejak tahun 2022; yang diperkirakan angka pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara sebesar 5,5% di tengah lingkungan ekonomi makro yang lebih menantang akibat Pandemi Covid-19 dan konflik geopolitik di Ukraina. Meskipun pertumbuhan enam ekonomi ASEAN (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam) akan menurun menjadi 4,4 persen pada 2023 dari proyeksi 5,6 persen pada tahun 2022; namun ASEAN masih menjadi salah satu kawasan pertumbuhan tercepat secara global di masa depan; sehingga sebagai tujuan yang menarik untuk investasi internasional. Selain *foreign direct investment* yang menarik; rivalitas negara adidaya (AS dan Tiongkok) membawa negara-negara ASEAN untuk memperoleh keuntungan dari posisi geopolitik yang istimewa di masa depan; dikarenakan persaingan AS-Tiongkok semakin intensif dan di satu sisi mereka berusaha untuk memperdalam hubungan di kawasan tersebut. Kedua negara telah menyoroti komitmen mereka untuk berdagang dengan ekonomi ASEAN, seperti Tiongkok khususnya melalui akses ke *Regional Comprehensive Economic Partnership* dan *Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership*.

Untuk itu, Indonesia sebagai Ketua ASEAN tahun 2023 memiliki misi untuk memperkuat pemulihan ekonomi kawasan yang berlandaskan *sustainable development*; dengan menjadikan kawasan tersebut sebagai *Free Trade Area* secara lebih luas dan penuh persaingan pasar global. Apabila ASEAN terus bertahan menjadi *Free Trade Area*, maka ini akan memperluas inter-konektivitas ekonomi negara-negara anggota dengan negara mitra diluar kawasan, sehingga membuka peluang hingga menyediakan akses istimewa bagi peluang investasi di Asia Tenggara. Pasar bebas di ASEAN berhasil menyumbang sekitar 7% dari PDB global, dimana kawasan ini berpotensi berada di jalur untuk menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada tahun 2030. Kehadiran *ASEAN Free Trade Area* ini dapat meningkatkan daya saing kawasan sebagai basis produksi di pasar dunia, agar menarik lebih banyak investasi asing langsung ke ASEAN itu sendiri. Oleh karena itu, *Free Trade Area* ini berkontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi ASEAN selama tahun 2021-2023, dimana berikut beberapa buktinya:

**Tabel 1.** Daftar Sektor Investasi di ASEAN Tahun 2021-2023

Daftar Negara	Sektor	Target Investasi
Singapura	IT, kedirgantaraan, elektronik, farmasi, dan layanan profesional	US\$100 miliar (2021)
Indonesia	Transportasi, gudang logistik, pertambangan, dan telekomunikasi	1. US\$43 miliar (2022) 2. US\$92 miliar (2023)

Vietnam	Kayu, jalan raya, kereta api, pelabuhan laut, dan jalur udara	US\$ 36-38 miliar (2023)
Thailand	<i>Cryptocurrency</i> , <i>fintech</i> , kecerdasan buatan, serta perawatan kesehatan	US\$20 miliar (2022)

Sumber: Sektor Investasi ASEAN 2021-2023

Data dari tabel di atas menunjukkan bahwa ASEAN menjadi kawasan yang menarik di mata investor, karena sumber daya alam yang melimpah dan pasar domestik yang besar sebesar 666.19 juta penduduk (didominasi generasi muda). Para investor asing ini diberikan akses ke sejumlah industri yang kompetitif secara internasional dan berpeluang membantu dalam hal peluang pasar yang lebih besar, termasuk kepastian bagi produsen.<sup>14</sup>

Berdasarkan bukti pertumbuhan ekonomi tersebut, keketuaan Indonesia dalam ASEAN 2023 ingin mendorong lebih banyak investasi dan perdagangan dalam setiap sektor strategis bagi kawasan. Investasi ini akan terlaksana melalui kemitraan yang sangat erat di bidang pembangunan yang mengarah pada percepatan kemajuan maupun stabilitas ekonomi. Karena setiap tahunnya mengalami peningkatan investasi yang signifikan di Asia Tenggara, Indonesia sebagai ketua ASEAN tahun 2023 percaya diri untuk membawa perubahan baru demi tercapainya pertumbuhan ekonomi, sehingga nantinya ASEAN akan menjadi *leadership* dan roda perekonomian global di tengah pemulihan yang masih berlangsung. Perubahan baru ini akan terwujud dengan Indonesia harus mampu mengajak setiap negara anggota ASEAN untuk mengambil langkah kolektif dalam mempererat kerangka kolaboratif berdasarkan dua pilar *Priorities Economic Deliverables* (PEDs), meliputi *Recovery-Rebuilding* dan *Digital Economy*. Melalui PEDs tersebut, terdapat harapan bagi ASEAN untuk mampu melangkah bersama sebagai *Epicentrum of Growth* dalam menyongsong *macroeconomic challenges* di era digital. Berikut dua pilar *Priorities Economic Deliverables* yang akan dilaksanakan oleh ASEAN

**a. *Recovery-Rebuilding***

ASEAN berupaya untuk mengeksplorasi campuran kebijakan yang terintegrasi, terencana, serta dikomunikasikan secara efektif untuk memastikan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, serta demi memitigasi risiko seperti inflasi maupun volatilitas aliran modal. Dari sini ASEAN akan menjajaki strategi diversifikasi mata uang dengan eksplorasi transaksi mata uang lokal, atau lebih dikenal sebagai *Local Currency Settlement*.

**b. *Digital Economy***

Untuk mengikuti perkembangan digital, ASEAN berupaya meningkatkan interkoneksi sistem pembayaran regional melalui *QR Code* lintas batas atau dikenal sebagai *Regional Payment Connectivity* (RPC). Kehadiran *QR Code* lintas batas ini menciptakan iklim ekonomi dan keuangan

---

<sup>14</sup>Fox, James. 2023. *ASEAN Economic Outlook 2023*. 3 Januari. Diakses dari ASEAN Briefing: <https://www.aseanbriefing.com/news/asean-economic-outlook-2023/>

digital ASEAN secara terintegrasi, serta sesuai *G20 Roadmap for Enhancing Cross Border Payments*.<sup>15</sup>

Dalam KTT ASEAN ke-42 tanggal 11 Mei 2023, Indonesia melalui Presiden Joko Widodo mengajak para pemimpin negara anggota ASEAN untuk saling bersepakat dalam meningkatkan sentralitas perekonomian kawasan melalui *Local Currency Settlement* dalam transaksi perdagangan intra-negara.<sup>16</sup> *Local Currency Settlement* (LCS) merupakan pelaksanaan transaksi bilateral antara dua negara yang dilakukan dalam mata uang masing-masing negara sebagai tempat penyelesaian dilakukan dalam yurisdiksinya.<sup>17</sup> Kerangka kerja sama untuk mewujudkan LCS tersebut memungkinkan transaksi bilateral antar negara kawasan yang tidak akan bergantung pada dolar AS, namun menggunakan mata uang lokal masing-masing. Beberapa negara ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand mulai menerapkan LCS dalam hubungan perdagangan antar satu sama lain, serta mewajibkan investor dari luar kawasan untuk menggunakan mata uang lokal dalam menanam modal. Selanjutnya, persiapan juga telah dilakukan untuk memperluas jangkauan *Local Currency Settlement* ke seluruh kawasan ASEAN, termasuk di Myanmar.

Posisi Indonesia sebagai ketua ASEAN menjadi momentum yang tepat untuk mempromosikan penguatan ketahanan ekonomi kawasan (*money market*), khususnya penggunaan mata uang lokal dalam menjalin kerja sama perdagangan dan investasi secara bilateral di tengah fluktuasi kurs dolar terhadap nilai tukar mata uang di sejumlah negara. LCS menjadi instrumen tambahan yang dioptimalisasi oleh otoritas moneter dalam rangka menjaga stabilitas mata uang lokal, seiring dengan terus menguatnya dolar AS hingga derasnya aliran keluar modal asing (*capital outflow*).

Dolar AS mendominasi perdagangan global selama beberapa dekade. Hal ini bukan hanya karena AS sebagai negara ekonomi terbesar di dunia, tetapi juga karena harga minyak dan sebagian besar komoditas dalam dolar AS. Namun, sejak *Federal Reserve* Amerika Serikat memulai strategi kenaikan suku bunga yang agresif, bank sentral negara berkembang terpaksa menaikkan suku bunga mereka sendiri untuk membendung depresiasi tajam mata uang mereka.<sup>18</sup> Kenaikan dolar AS berpengaruh terhadap peningkatan *production cost* akibat importasi bahan baku yang semakin mahal. Ongkos produksi yang sangat besar juga berdampak terhadap naik atau turunan harga jual suatu produk di tingkat konsumen; dimana ini menyebabkan terjadinya inflasi.

Di kawasan ASEAN itu, perdagangan bilateral di Asia Tenggara telah lama didominasi oleh penggunaan dolar. Hal ini terutama disebabkan oleh stabilitas dan likuiditas dolar AS, dan juga

---

<sup>15</sup>Hutabarat, Leonard F. "Penguatan Sektor E-Commerce ASEAN Untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi: Optimalisasi Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023." *Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri: Policy Brief*, Vol. 7, No. 2 (2022): 1-6.

<sup>16</sup>Hikam, Herdi Alif Al. 2023. Negara ASEAN Sepakat Perkuat Penggunaan Mata Uang Lokal, Bakal Diet Dolar? 11 Mei. Diakses dari Detik Finance: <https://finance.detik.com/moneter/d-6715267/negara-asean-sepakat-perkuat-penggunaan-mata-uang-lokal-bakal-diet-dolar>

<sup>17</sup>Jalin. 2021. Memahami *Local Currency Settlement* Dalam Transaksi Bilateral. 18 Oktober. Diakses dari <https://www.jalin.co.id/id-id/berita/blog/memahami-local-currency-settlement-dalam-transaksi-bilateral>

<sup>18</sup>Medina, Ayman Falak. 2023. *ASEAN to Increase Local Currency Trade, Reducing Reliance on the US Dollar*. 12 Mei. Diakses dari ASEAN Briefing: [https://www.aseanbriefing.com/news/asean-to-increase-local-currency-transactions-reducing-reliance-on-the-us-dollar#:~:text=Through%20the%20local%20currency%20transaction,its%20LCT%20\(LCT\)%20plans](https://www.aseanbriefing.com/news/asean-to-increase-local-currency-transactions-reducing-reliance-on-the-us-dollar#:~:text=Through%20the%20local%20currency%20transaction,its%20LCT%20(LCT)%20plans)

kurangnya mata uang regional yang tidak seperti Uni Eropa. Namun, transaksi menggunakan dolar telah membuat perdagangan, investasi, dan bisnis menjadi kurang efisien karena membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengubah mata uang lokal menjadi dolar dan mengubahnya kembali. Indonesia melihat jika ASEAN terus ketergantungan berlebihan terhadap dolar AS, maka berpotensi membuat mata uang lokal tertekan dan biaya perdagangan menjadi lebih mahal. Dengan begitu, ASEAN perlu mengadopsi pembayaran bilateral dengan *Local Currency Settlement*; dimana ini juga akan membantu menguatkan mata uang lokal mereka sebagai kelanjutan pergeseran de-dolarisasi di kawasan.

*Local Currency Settlement Framework* ini telah diterapkan sebelumnya oleh Thailand dan Malaysia memulai kerja sama bilateral untuk penyelesaian mata uang lokal dan diikuti oleh Indonesia pada tahun 2018. Tujuan dari LCS di ASEAN adalah untuk membangun kerangka moneter yang memungkinkan penggunaan mata uang lokal dalam memfasilitasi pembayaran lintas batas dan arus perdagangan di Kawasan Asia Tenggara. Pada akhirnya, LCS juga merupakan langkah strategis dalam mengembangkan efisiensi transaksi dengan menerapkan perdagangan langsung tanpa harus membeli dan menjual dolar untuk konversi.

Secara umum, LCS ini juga akan meningkatkan efisiensi pasar di ASEAN dan nantinya berpengaruh pada pengembangan pasar mata uang lokal di masing-masing negara anggota. Dalam segi penerapan LCS kedepannya, ASEAN perlu mengikuti kebijakan yang pernah dibentuk oleh bank-bank ACCD (*Appointed Cross Currency Dealer*) yang berasal dari Indonesia, Malaysia, dan Thailand terkait mata uang lokal; yang meliputi penerbitan kwitansi pembayaran impor dan ekspor untuk perdagangan barang dan jasa, penerimaan dan pembayaran transaksi kompensasi tenaga kerja dan pendapatan investasi, pengiriman uang, serta investasi langsung antara pelanggan LCS dengan batas minimum kepemilikan 10%.<sup>19</sup> Indonesia melihat bahwa penerapan LCS perlu dibarengi dengan konektivitas pembayaran digital berupa *QR Code* lintas batas antar negara di ASEAN. Inisiatif dari ASEAN untuk meningkatkan lanskap pembayaran regionalnya adalah peluncuran kode respons cepat (atau *Quick Response Code*). Bank sentral Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand telah menggunakan sistem pembayaran kode QR nirsentuh untuk barang dan jasa antar negara, dimana ini mendorong inklusi keuangan yang lebih besar bagi konsumen dan usaha kecil menengah di kawasan tersebut. Kelima negara ASEAN yang telah menerapkan LCS ini meneken kerja sama, agar mata uang lokal mereka ini dapat di transaksi secara lintas batas melalui kode QR maupun *fast payment*.<sup>20</sup> Salah satu contohnya seperti transaksi di Thailand menggunakan aplikasi Indonesia akan dibayar melalui pertukaran langsung antara rupiah dan baht; melewati dolar AS sebagai perantara.<sup>21</sup>

Setelah tautan koneksi selesai, bank sentral akan berusaha untuk terhubung dengan kluster lain di seluruh dunia. Sistem pembayaran digital QR diharapkan dapat diterapkan di antara anggota ASEAN pada September 2023. Prakarsa ini akan mendorong inklusi keuangan yang lebih besar bagi penduduk yang tidak memiliki akses dan layanan perbankan. Selanjutnya, untuk usaha kecil menengah di kawasan ASEAN yang berada di angka 99% dari sektor bisnis; penggunaan sistem

---

<sup>19</sup>Lee, Cassey, and Eileen Lee 2019. *E-commerce, Competition & ASEAN Economic Integration*. Singapura: ISEAS-Yusof Ishak Institute. (Hal 7-32)

<sup>20</sup>Rafferty, Nathan Eleazar, and Ahmad Nurul Fajar. "Integrated QR Payment System (QRIS): Cashless Payment Solution in Developing Country from Merchant Perspective." *Asia Pacific Journal of Information Systems*, Vol. 32, No. 3 (2022): 630-655.

<sup>21</sup>HKTDC Research. 2022. *Indonesia: ASEAN QR Cross-Border Payments Link-up Starts with Thailand*. 11 Oktober. Diakses dari <https://research.hktdc.com/en/article/MTE5MTU3OTAZNg>

pembayaran *QR Code* lintas batas akan memungkinkan mereka untuk meraih lebih banyak peluang pasar dan meningkatkan rantai nilai.

**b. Peluang dan Manfaat *Local Currency Settlement* hingga *QR Code* Lintas Batas bagi Integrasi Ekonomi Kawasan ASEAN pada Era Digital**

Integrasi ekonomi di ASEAN telah lama menjadi impian bagi kawasan tersebut dengan pertumbuhan pasar yang besar di masa depan. Pasar yang terintegrasi akan berarti pengembangan lebih lanjut dalam sektor keuangan termasuk perbankan, asuransi, pasar modal, serta perdagangan. Integrasi ekonomi dalam sektor keuangan di ASEAN telah menjadi proses yang berlarut-larut; dimana langkah konkret pertama menuju integrasi dimulai pada tahun 2003 ketika terwujudnya kesepakatan antara para menteri keuangan ASEAN tentang *The Roadmap for Monetary Integration in ASEAN*. Kemudian diikuti oleh langkah lain ketika para pemimpin ASEAN mendeklarasikan pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2016 yang meliputi rencana liberalisasi perdagangan dan jasa, termasuk jasa keuangan, rezim akun modal, dan integrasi sistem keuangan. Oleh karena itu, Masyarakat Ekonomi ASEAN hadir untuk menghapus pembatasan layanan keuangan intra-regional dan penyediaan akun modal, harmonisasi sistem pembayaran, serta pengembangan pasar modal.<sup>22</sup>

Kerangka Integrasi Ekonomi ASEAN ditetapkan sebagai pendekatan utama untuk inisiatif untuk membebaskan dan mengintegrasikan sektor keuangan pada kontemporer ini, melalui penerapan *Local Currency Settlement* dan *QR Code* Lintas Batas. Mengacu pada pemikiran Van Niekerk, *subsidiarity* menjadi prinsip yang menunjukkan betapa pentingnya untuk membagi tanggung jawab antara negara anggota dalam satu kawasan untuk memfasilitasi proses integrasi ekonomi. Di tengah keketuan ASEAN tahun 2023, Indonesia dengan prinsip *subsidiarity* berupaya mendorong integrasi ekonomi di kawasan, agar negara-negara anggota ASEAN sepakat untuk membagi tanggung jawab dalam menerapkan transaksi setiap pembiayaan dengan menggunakan LCS melalui *QR Code*. Meskipun, kondisi setiap negara anggota berbeda (seperti Myanmar yang sedang dilanda krisis politik akibat kekuasaan Junta Militer), namun Indonesia sebagai ketua ASEAN yakin bahwa LCS dan *QR Code* Lintas Batas akan diterapkan untuk menciptakan interkoneksi pembayaran secara efisien dan berlandaskan pemanfaatan kemajuan teknologi, demi meningkatkan *economic growth* (*pragmatism*).

Perlu dicatat bahwa kerja sama yang ada saat ini untuk kerangka kebijakan LCS dan inisiatif *QR Code* lintas batas di ASEAN sedang dipelopori oleh Indonesia, Thailand, dan Malaysia, yang kebetulan juga merupakan bagian dari Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT). Ketiga negara tersebut, khususnya Indonesia memiliki sentimen yang sama dalam mengurangi ketergantungan pada dolar AS, serta melihat Kawasan ASEAN memiliki keuntungan yang menarik karena kedekatan geografis antar negara anggota yang strategis mungkin telah berkontribusi pada tingkat perdagangan yang lebih tinggi dan saling terhubung. Karena telah menerapkan kebijakan LCS sejak 2018 inilah menyebabkan Indonesia merasa percaya diri bahwa posisi mereka sebagai ketua ASEAN akan membuka jalan bagi integrasi ekonomi di sektor keuangan ASEAN secara lebih luas. Karena pengurangan ketergantungan dolar dan diversifikasi mata uang dapat berarti stabilitas nilai

---

<sup>22</sup>Ishikawa, Koichi. "The ASEAN Economic Community and ASEAN economic integration." *Journal of Contemporary East Asia Studies*, Vol. 10, No. 1 (2021): 24-41.

mata uang lokal, ASEAN perlu memastikan bahwa pengungkapan data tentang penggunaan kerangka kerja LCS dapat diakses oleh usaha kecil menengah yang mungkin tertarik untuk menjalankan bisnis dengan risiko nilai tukar yang lebih rendah, karena banyaknya pilihan mata uang transaksi. Kemudian, informasi tentang mata uang penyelesaian preferensial antara perusahaan dan survei reguler untuk penggunaan mata uang lokal dalam investasi dan perdagangan adalah kunci untuk mempromosikan penggunaan LCS yang lebih besar di kawasan Asia Tenggara itu sendiri, dimana ini berdampak pada naiknya jumlah pasar transaksi secara langsung dan membuka pasar valuta asing ASEAN yang luas.

Kerangka kerja LCS membawa beberapa manfaat penting seperti sistem pembayarannya lebih efisien untuk transaksi yang lebih cepat, menyediakan instrumen lindung nilai alternatif untuk pembiayaan ekspor dan investasi langsung, dan mengekspos penyelesaian transaksi ke mata uang yang beragam dimana diversifikasi diharapkan dapat mendukung stabilitas ekonomi makro dan mendorong pemulihan ekonomi. Penggunaan LCS berpotensi membawa perubahan struktural pada *invoice* pembayaran di ASEAN. Meskipun pangsa penggunaan mata uang lokal untuk perdagangan dan investasi masih kecil, dengan hanya sekitar kurang dari 10% transaksi yang dilakukan dalam mata uang lokal dibandingkan dengan dolar; namun tetap ada harapan besar untuk penggunaan kerangka LCS yang lebih luas mengingat pertumbuhan positif penggunaannya sejak pertama kali diterapkan oleh Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Bahkan sejak tahun 2019, total perdagangan yang dilakukan dalam LCS telah terakumulasi hingga US\$83 miliar. Pertumbuhan positif oleh ketiga negara tersebut inilah menjadi langkah awal menuju jalan panjang dalam memperkuat ketahanan mata uang lokal bagi ASEAN di masa depan.<sup>23</sup>

Penerapan LCS ini berpotensi menguntungkan kawasan ASEAN itu sendiri, karena sebagai contoh Indonesia yang menerapkannya, telah menunjukkan total nilai transaksi perdagangan mereka selama menggunakan mata uang lokal pada tahun 2022, yakni mencapai USD3,8 miliar. Perluasan LCS ini kemungkinan besar mendukung sektor bisnis untuk dapat memperoleh kemudahan dalam transaksi suatu produk, dengan risiko kepabeanaan yang lebih kecil.<sup>24</sup> Jika seluruh anggota ASEAN menerapkan LCS dan meninggalkan dolar AS, maka ekonomi kawasan akan semakin kuat dan mandiri sesuai dengan motto ASEAN tahun 2023 (*Epicentrum of Growth*).

Demikian pula, ada banyak manfaat bahwa pembayaran *QR Code* Lintas Batas juga akan berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi kawasan ASEAN terkait keuangan digital selain adanya penerapan LCS, karena inisiatif *QR Code* Lintas Batas yang terintegrasi dapat menjadi ujung tombak pengembangan teknologi dan infrastruktur keuangan standar, yang mungkin memperluas pembayaran pengiriman uang lintas batas dan penjualan pasar saham. Inisiatif ini mungkin memiliki prospek besar untuk meningkatkan efisiensi dalam perdagangan grosir dan eceran internasional, serta mempromosikan digitalisasi investasi.

Selain itu, *QR Code* Lintas Batas juga berpotensi meningkatkan nilai tambah usaha kecil menengah dalam melakukan transaksi langsung secara *online* dan mendorong pemulihan pariwisata di kawasan Asia Tenggara. Inisiatif *QR Code* Lintas Batas ASEAN bermanfaat untuk menghubungkan

<sup>23</sup>Bank Indonesia. 2019. *Bank Indonesia Committed To Local Currency Settlement in Asian Region*. 16 April. Diakses dari <https://www.bi.go.id/en/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/Bank-Indonesia-Terus-Berkomitmen-Dukung-Implementasi-Penggunaan-Local-Currency-Settlement-di-Kawasan-ASEAN.aspx>

<sup>24</sup>Sakshi Post. 2023. *ASEAN to Switch to Local Currency Use in Region to Avoid Crisis*. 1 April. Diakses dari <https://www.sakshipost.com/news/asean-switch-local-currency-use-region-avoid-crisis-175965>

pembayaran kode QR secara nasional dan antar negara. *QR Code* ini menjadi wadah untuk memungkinkan masyarakat Asia Tenggara untuk membeli barang dan jasa di seluruh wilayah ASEAN secara mudah dengan menggunakan mata uang lokal (LCS), serta memudahkan usaha kecil menengah untuk memperluas basis pelanggan mereka dan menjangkau pasar baru di wilayah tersebut. Penggunaan *QR Code* Lintas Batas ASEAN akan mengurangi biaya transaksi dan risiko valuta asing; dimana ini akan membuka peluang baru bagi bisnis dan investasi hingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi digital di kawasan ASEAN.<sup>25</sup>

Indonesia pada 17 Agustus 2019 membuat inisiatif untuk memperluas fitur dan layanan *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS). Inisiatif tersebut menjadi rujukan bagi Indonesia itu sendiri sebagai ketua ASEAN pada tahun 2023 untuk mengimplementasikan komitmen interkoneksi QR secara domestik dan kawasan Asia Tenggara. Hal ini sejalan dengan dokumen *Bandar Seri Begawan Roadmap (BSBR): An ASEAN Digital Transformation Agenda to Accelerate ASEAN's Economic Recovery and Digital Economy Integration* yang disahkan oleh Masyarakat Ekonomi ASEAN yang menegaskan kembali kesepakatan bersama ASEAN untuk agenda lima tahun menuju pengembangan *ASEAN Digital Economy Agreement* dan negosiasi *Digital Economy Framework Agreement* (DIFA) pada tahun 2025, khususnya pembayaran menggunakan *QR Code* Lintas Batas.

Kerangka kebijakan ASEAN untuk Pembayaran Ritel berbasis *QR Code* Lintas Batas secara *real-time* termasuk dalam fase Percepatan, yang bertujuan untuk menerapkan pembayaran digital lintas batas yang dapat dioperasikan melalui QR di kawasan ASEAN. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan promosi inklusi keuangan melalui layanan keuangan digital dan konektivitas pembayaran kawasan dalam rangka mempercepat strategi transformasi digital secara inklusif, yang mencakup pengembangan Kerangka Kode QR *inter-operable ASEAN*.<sup>26</sup> Selain itu, inisiatif QR lintas batas ini memiliki potensi untuk berjalan seiring dengan hadirnya kerangka kerja LCS untuk membantu menjaga stabilitas ekonomi makro dan penguatan mata uang lokal setiap negara anggota ASEAN. Bank sentral di beberapa negara anggota ASEAN, khususnya Bank Indonesia telah memulai percontohan QR lintas batas yang memungkinkan pedagang dan konsumen melakukan sistem pembayaran ritel secara *real-time* melalui *QR Code*. Sistem *QR Code* Lintas Batas ASEAN juga melibatkan bank sentral di kawasan yang bekerja secara langsung satu sama lain. Biaya dan nilai tukar dapat ditentukan dengan kesepakatan bersama antara bank sentral itu sendiri, bukan melalui pihak ketiga, sehingga mendorong transaksi perdagangan yang lebih efisien dan murah.

Pembayaran menggunakan QR sebagai metode pembayaran yang andal, terjangkau, dan efisien yang berpotensi meningkatkan partisipasi usaha kecil menengah dalam perdagangan barang dan jasa internasional, termasuk dalam sektor pariwisata karena kepraktisan dan kenyamanannya. QR lintas batas memiliki potensi yang menguntungkan dalam meningkatkan efisiensi tindakan serta mempercepat digitalisasi perdagangan dan investasi. Berikut beberapa manfaat dari *QR Code* Lintas Batas bagi ASEAN:

---

<sup>25</sup>Guild, James. 2023. *ASEAN's Cross-Border Digital Payment System Explained*. 13 Juni. Diakses dari The Diplomat: <https://thediplomat.com/2023/06/aseans-cross-border-digital-payment-system-explained/>

<sup>26</sup>Bhwana, P. G. 2023. *ASEAN Nations to Implement Universal QR Code, Says ASEAN-BAC Chair*. 11 Mei. Diakses dari Tempo.co: <https://en.tempo.co/read/1724432/asean-nations-to-implement-universal-qr-code-says-asean-bac-chair>

1. Universal

*QR Code* dapat menerima pembayaran aplikasi pembayaran apapun, jadi masyarakat Asia Tenggara tidak perlu memiliki berbagai macam aplikasi pembayaran.

2. Mudah dan menguntungkan

Bagi konsumen: tinggal scan dan klik bayar. Sedangkan, bagi *merchant*: tidak perlu memajang banyak *QR Code*, cukup satu QR yang dapat dipindai menggunakan aplikasi pembayaran apapun.

3. Langsung

Pembayaran dengan *QR Code* langsung diproses seketika; sehingga konsumen dan *merchant* langsung mendapat notifikasi transaksi.

Prinsip pembayaran *QR Code* Lintas Batas adalah *just scan and pay!*, sehingga efisiensi penggunaannya antara lain:

1. Bersifat cepat dan kekinian.
2. Tidak perlu menggunakan uang tunai dalam setiap transaksi.
3. Terlindungi, karena sudah pasti memiliki izin dan diawasi oleh setiap bank sentral di ASEAN. Sehingga, sudah dipastikan akan terhindar dari penggunaan uang palsu dan berpotensi mencegah tindak kecurangan dari pembukuan transaksi tunai.
4. Penjualan berpotensi meningkat karena dapat menerima pembayaran berbasis QR apapun, serta meningkatkan *branding* dan mengurangi biaya pengelolaan kas.
5. Transaksi tercatat otomatis dan dapat dilihat setiap waktu.

*QR Code* Lintas Batas ini perlu mengakomodir dua model penggunaan, seperti *Merchant Presented Mode* (MPM) dan *Customer Presented Mode* (CPM). Pertama, *Merchant Presented Mode* yang terbagi menjadi statis hingga dinamis. Dalam MPM yang statis; konsumen hanya melakukan *scan*, masukkan nominal dan PIN, serta klik bayar; dimana notifikasi transaksi langsung diterima antara konsumen dan *merchant* (MPM statis digunakan bagi usaha kecil menengah). Dalam MPM yang dinamis; QR dikeluarkan melalui suatu *device* seperti mesin EDC atau *smartphone*; dimana *Merchant* perlu memasukkan nominal pembayaran terlebih dahulu, kemudian konsumen melakukan *scan QR Code* yang tampil (MPM dinamis digunakan bagi perusahaan besar dan investor asing atau apabila adanya volume transaksi tinggi). Kedua, *Consumer Presented Mode* (CPM); dimana konsumen cukup menunjukkan *QR Code* yang ditampilkan dari aplikasi pembayaran pelanggan untuk di-*scan* oleh *merchant*.

Sejauh ini terdapat 70 juta usaha kecil menengah, 622 juta konsumen, dan lebih dari 100 juta pengguna internet di kawasan ASEAN; yang semuanya memiliki potensi untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi digital kawasan. Oleh karena itu, bank sentral di negara-negara anggota ASEAN perlu memperluas upaya digitalisasi sektor keuangan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif untuk pasar keuangan yang terintegrasi. Akses dan kesadaran yang lebih besar pada keuangan

digital tidak hanya akan mendorong perekonomian kawasan; namun juga mengurangi ketergantungan uang tunai, eksklusif keuangan, serta mendorong liberalisasi pasar bebas. Dalam hal ini, Kerangka Bank ASEAN yang Berkualifikasi perlu diterapkan untuk membantu bank di beberapa negara anggota yang belum menerapkan *QR Code* Lintas Batas (Kamboja, Myanmar, Vietnam, dan Laos), agar melaksanakan layanan keuangan yang sesuai dan membangun kemitraan dengan *multi-stakeholders* dalam memastikan penyediaan teknologi keuangan digital dan layanan *e-platform* di mana terdapat dominasi pasar berbasis uang tunai dan kesiapan teknologi keuangan yang terbatas. Dengan demikian, inisiatif penerapan *Local Currency Settlement* dan *QR Code* Lintas Batas yang dipromosikan oleh Indonesia selama menjadi ketua ASEAN tahun 2023, telah beroperasi di bawah prinsip non-intervensi yang sesuai dengan *ASEAN Way* dalam hal kekuatan moneter dan otonomi melalui *currency deterritorialization*. Sehingga, kerja sama dalam menumbuhkan kesatuan ekonomi-politik serta kesiapan domestik antar negara anggota ASEAN itu sendiri mengenai penggunaan LCS dan *QR Code* Lintas Batas perlu dilakukan, untuk mengedepankan integrasi ekonomi Kawasan ASEAN pada era disrupsi digital di masa depan.

## Kesimpulan

Indonesia mendorong negara-negara Asia Tenggara untuk beralih pada penggunaan *Local Currency Settlement* dan *QR Code* lintas batas dalam perdagangan regional selama menjadi ketua ASEAN tahun 2023, karena penggunaan keduanya tersebut menjadi instrumen prioritas dengan tujuan untuk menjaga stabilitas mata uang lokal, seiring dengan terus menguatnya dolar AS hingga derasnya aliran keluar modal asing (*capital outflow*). Penggunaan LCS dinilai lebih efisien dan fleksibel untuk dilakukan diberbagai negara anggota ASEAN, tanpa harus bergantung kepada satu mata uang tunggal. Indonesia menekankan bahwa promosi penggunaan LCS tersebut menjadi sebuah agenda penting di masa keketuaan ASEAN tahun 2023, dimana inisiatif transaksi LCS itu sendiri dapat meningkatkan perdagangan di dalam blok tersebut, memperdalam integrasi keuangan regional, memperkuat ketahanan keuangan, dan berkontribusi pada *value chain* regional. Pentingnya penggunaan LCS ini juga dengan tujuan untuk membantu mengurangi ketergantungan negara-negara Asia Tenggara terhadap mata uang Amerika Serikat (US\$), demi menghindari risiko terkait fluktuasi dolar AS. Selain itu, penerapan *QR Code* sebagai instrumen dari LCS telah menunjukkan dampak positif untuk mempermudah dalam pembayaran suatu produk dengan berbasis teknologi digital secara mudah bagi pemilik usaha makro, mikro, maupun UMKM.

Tema “*Epicentrum of Growth*” menjadi tonggak keyakinan bagi Indonesia dapat membawa ASEAN lebih maju, termasuk pemerataan kawasan dalam hal integrasi ekonomi yang berdasarkan tiga prinsip yang dikemukakan oleh Van Niekerk yakni *open-regionalism*, *subsidiarity*, dan *pragmatism*. Inisiasi Indonesia dalam penggunaan LCS telah direspon positif oleh negara anggota ASEAN lain, bahkan hingga saat ini sudah terhitung 5 negara yang telah memakai LCS dan *QR Code* sebagai salah satu alat transaksi perdagangannya. Walaupun demikian, Indonesia dalam kekuatan ASEAN 2023 juga memiliki berbagai hambatan dalam pemerataan dan promosi LCS dan *QR Code* lintas batas di negara anggota ASEAN, hal ini diakibatkan oleh masih belum meratanya penggunaan teknologi di kawasan sehingga banyak pelaku usaha yang belum mengetahui, bahkan mendengar seperti *QR Code*. Penerapan LCS ini berpotensi menguntungkan kawasan ASEAN itu sendiri, karena

sebagai contoh Indonesia yang menerapkannya, telah menunjukkan total nilai transaksi perdagangan mereka selama menggunakan mata uang lokal pada tahun 2022, yakni mencapai USD3,8 miliar. Oleh sebab itu, diharapkan Indonesia sebagai *chairman* ASEAN tahun 2023 tetap mempromosikan LCS maupun *QR Code* lintas batas di ASEAN secara optimis untuk mewujudkan “*Epicentrum of Growth*” bersama-sama.

## Referensi

- Bakry, U. S. (2015). *Ekonomi Politik Internasional: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Nilai Ekspor Impor Indonesia*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/subject/8/ekspor-impor.html>
- Bank Indonesia. (2019, April 16). *Bank Indonesia Committed To Local Currency Settlement in Asian Region*. Diakses dari <https://www.bi.go.id/en/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/Bank-Indonesia-Terus-Berkomitmen-Dukung-Implementasi-Penggunaan-Local-Currency-Settlement-di-Kawasan-ASEAN.aspx>
- Bank Indonesia. (2023). *ASEAN Indonesia 2023*. Diakses dari <https://www.bi.go.id/id/asean-2023/default.aspx>
- Bhwana, P. G. (2023, Mei 11). *ASEAN Nations to Implement Universal QR Code, Says ASEAN-BAC Chair*. Diakses dari Tempo.co: <https://en.tempo.co/read/1724432/asean-nations-to-implement-universal-qr-code-says-asean-bac-chair>
- Bhwana, P. G. (2023, Juli 16). *Indonesia Foreign Minister: Preventive Diplomacy Vital for Averting Regional Conflict*. Diakses dari Tempo.co: [https://en.tempo.co/read/1748601/indonesia-foreign-minister-preventive-diplomacy-vital-for-averting-regional-conflict?tracking\\_page\\_direct](https://en.tempo.co/read/1748601/indonesia-foreign-minister-preventive-diplomacy-vital-for-averting-regional-conflict?tracking_page_direct)
- Chew, A. (2023, Juni 6). *Indonesia-Malaysia QR Code Payments Get Started Under ASEAN System*. Diakses dari Nikkei Asia: <https://asia.nikkei.com/Business/Finance/Indonesia-Malaysia-QR-code-payments-get-started-under-ASEAN-system>
- Fox, J. (2023, Januari 3). *ASEAN Economic Outlook 2023*. Diakses dari ASEAN Briefing: <https://www.aseanbriefing.com/news/asean-economic-outlook-2023/>
- Guild, J. (2023, Juni 13). *ASEAN's Cross-Border Digital Payment System Explained*. Diakses dari The Diplomat: <https://thediplomat.com/2023/06/aseans-cross-border-digital-payment-system-explained/>
- Hikam, H. A. A. (2023, Mei 11). *Negara ASEAN Sepakat Perkuat Penggunaan Mata Uang Lokal, Bakal Diet Dolar?* Diakses dari Detik Finance: <https://finance.detik.com/moneter/d-6715267/negara-asean-sepakat-perkuat-penggunaan-mata-uang-lokal-bakal-diet-dolar>

- HKTDC Research. (2022, Oktober 11). *INDONESIA: ASEAN QR Cross-Border Payments Link-up Starts with Thailand*. Diakses dari <https://research.hktdc.com/en/article/MTE5MTU3OTAzNg>
- Hutabarat, L. F. (2022). Penguatan Sektor E-Commerce ASEAN Untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi: Optimalisasi Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023. *Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri: Policy Brief*, Vol. 7, No. 2, 1-6.
- Indonesia.go.id. (2023, Maret 18). *Mendorong ASEAN Gunakan Mata Uang Lokal*. Diakses dari <https://indonesia.go.id/kategori/ragam-asean-2023/6938/mendorong-asean-gunakan-mata-uan-g-lokal?lang=1>
- Indonesian Chamber of Commerce and Industry. (2023, Juni 20). *The Increasingly Evident Progress of ASEAN QR Code Financial Integration, Arsjad Rasjid: QR Codes of Thailand and Cambodia Have Been Connected*. Diakses dari <https://kadin.id/wp-content/uploads/20230620-ASEAN-QR-Code-Eng-Copy-.pdf>
- Ishikawa, K. (2021). The ASEAN Economic Community and ASEAN Economic Integration. *Journal of Contemporary East Asia Studies*, Vol. 10, No. 1, 24-41.
- Jalin. (2021, Oktober 18). *Memahami Local Currency Settlement Dalam Transaksi Bilateral*. Diakses dari <https://www.jalin.co.id/id-id/berita/blog/memahami-local-currency-settlement-dalam-transaksi-bilateral>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023, Mei 2). *Perkuat Posisi ASEAN, Pemerintah Optimis KTT ke-42 Sukses Respons Tantangan Terkini*. Diakses dari [https://www.kominfo.go.id/content/detail/48803/siaran-pers-no69hmkominfo052023-tentang-perkuat-posisi-asean-pemerintah-optimis-ktt-ke-42-sukses-respons-tantangan-terkini/0/siaran\\_pers](https://www.kominfo.go.id/content/detail/48803/siaran-pers-no69hmkominfo052023-tentang-perkuat-posisi-asean-pemerintah-optimis-ktt-ke-42-sukses-respons-tantangan-terkini/0/siaran_pers)
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2023, Mei 1). *Capaian Keketuaan ASEAN Indonesia 2023 Kuartal Pertama*. Diakses dari <https://kemlu.go.id/portal/id/read/4656/berita/capaian-keketuaan-asean-indonesia-2023-kuartal-pertama>
- King, J. (2022, Desember 9). *Multi-Currency will Define the 'Asian Century'*. Diakses dari The Banker: [https://www.thebanker.com/World/Asia-Pacific/Multi-currency-will-define-the-Asian-century/\(language\)/eng-GB](https://www.thebanker.com/World/Asia-Pacific/Multi-currency-will-define-the-Asian-century/(language)/eng-GB)
- Lee, C., & Lee, E. (2019). *E-Commerce, Competition & ASEAN Economic Integration*. Singapura: ISEAS-Yusof Ishak Institute.
- Malik, M. I. A. (2023, Januari 25). *Tantangan Indonesia Sebagai Ketua ASEAN 2023*. Diakses dari Viva.co.id: <https://www.viva.co.id/vstory/opini-vstory/1568533-tantangan-indonesia-sebagai-ketua-asean-2023>

- Mardania, A. (2018). *Local Currency Settlement (LCS) Framework and The ASEAN Way: Implementation of Regional Monetary Agenda (Doctoral Dissertation, Universitas Gadjah Mada)*.
- Medina, A. F. (2023, Mei 12). *ASEAN to Increase Local Currency Trade, Reducing Reliance on the US Dollar*. Diakses dari ASEAN Briefing: [https://www.aseanbriefing.com/news/asean-to-increase-local-currency-transactions-reducing-reliance-on-the-us-dollar/#:~:text=Through%20the%20local%20currency%20transaction,its%20LCT%20\(LCT\)%20plans](https://www.aseanbriefing.com/news/asean-to-increase-local-currency-transactions-reducing-reliance-on-the-us-dollar/#:~:text=Through%20the%20local%20currency%20transaction,its%20LCT%20(LCT)%20plans)
- Muta'ali, H. N. (2020). Kepentingan Indonesia Malaysia Thailand Terhadap Kerjasama Local Currency Settlement Framework (LCS). *E-jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, Vol. 8, No. 1.
- Nofansya, A., & Sidik, H. (2022). Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Malaysia-Thailand: Penguatan Local Currency Settlement (LCS) Framework Dalam Memfasilitasi Perdagangan. *Padjadjaran Journal of International Relations*, Vol. 4, No. 2, 164-178.
- Phoebe, M. (2022, Juni 18). *The Future of ASEAN Financial Integration Through the Local Currency Settlement Framework*. Diakses dari Moderndiplomacy: <https://moderndiplomacy.eu/2022/06/18/the-future-of-asean-financial-integration-through-the-local-currency-settlement-framework/>
- Rafaldhanis, M. R. A. (2023). ASEAN sebagai Lingkaran Konsentris Pertama Indonesia. *Jurnal Alternatif-Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, Vol. 14, No. 1.
- Rafferty, N. E., & Fajar, A. N. (2022). Integrated QR Payment System (QRIS): Cashless Payment Solution in Developing Country from Merchant Perspective. *Asia Pacific Journal of Information Systems*, Vol. 32, No. 3, 630-655.
- Raharjo, M. (2023). 'QRIS Cross Border' as Digital Financial Inclusion Acceleration in Southeast Asia. *Global Local Interactions: Journal of International Relations*, Vol. 3, No. 1, 151-161.
- Rasdiyanti, A. D. (2022). Analisis SWOT Kebijakan Local Currency Settlement Indonesia-China. *Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi*, 13-24.
- Rillo, A. D. (2018). ASEAN Financial Integration: Opportunities, Risks, and Challenges. *Public Policy Review*, Vol. 14, No. 5, 901-923.
- Sakshi Post. (2023, April 1). *ASEAN to Switch to Local Currency Use in Region to Avoid Crisis*. Diakses dari <https://www.sakshipost.com/news/asean-switch-local-currency-use-region-avoid-crisis-175965>
- Santoso, A. (2023, Mei 11). *ASEAN Agrees to Advance Use of Local Currencies: President Jokowi*. Diakses dari [Antaranews.com: https://en.antaranews.com/news/281322/asean-agrees-to-advance-use-of-local-currencies-president-jokowi](https://en.antaranews.com/news/281322/asean-agrees-to-advance-use-of-local-currencies-president-jokowi)

- Shimizu, J. (2019, Januari 30). *Exploring Local Currency Usage to Reduce Exchange Rate Risks in Asia*. Diakses dari Amro Asia: <https://www.amro-asia.org/exploring-local-currency-usage-to-reduce-exchange-rate-risks-in-asia/>
- Sussangkarn, C. (2020). Promoting Local Currency Usage in the Region. *Asian Economic Papers*, Vol. 19, No. 2, 1-16.
- Van Niekerk, L. K. (2005). Regional Integration: Concepts, Advantages, Disadvantages and Lessons of Experience. *Southern African Regional Poverty Network*. [https://sarpn.org/documents/d0001249/P1416-RI-concepts\\_May2005.pdf](https://sarpn.org/documents/d0001249/P1416-RI-concepts_May2005.pdf)
- Warjiyo, P. (2023). Synergy of Economic Policies and Innovation in Driving Momentum for Sustainable Global Economic Recovery in the Era of Digital Transformation. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Vol. 26, 1-8.
- Widy, P. E. (2022). Kerjasama *Local Currency Settlement* Dalam Meningkatkan Perdagangan Internasional Indonesia Tahun 2018-2022 (*Doctoral Dissertation*, Universitas Jenderal Soedirman).